

KONTRIBUSI PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI ACEH (2005-2017)

Fitrahadi Sandani, Anwar Yoesof, Herman,R

Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala

Email: fitrahadisandani25@yahoo.com, anwa@unsyiah.ac.id, herman_rn@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kontribusi Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh, 2005-2017. PMI Provinsi Aceh telah mengalami perkembangan baik dari segi keanggotaan, sarana prasarana dan sebagainya. Keberadaan PMI Aceh 2005-2017 telah berkontribusi dalam bidang sosial, keamanan, kesehatan dan kemanusiaan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui (1) perkembangan Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh, 2005-2017, (2) mengetahui kontribusi Palang Merang Indonesia Provinsi Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh, 2005-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah, yang terdiri dari 5 langkah: menentukan tema, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) keberadaan PMI sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan terus berkembang hingga saat ini. PMI Provinsi Aceh mulai terlihat eksistensinya terutama pasca tsunami 2004. Sejak 2005-2017 PMI Provinsi Aceh sudah memiliki ribuan relawan baik pengurus dan staf PMI Kabupaten dan Kota, Korps Sukarela, Tenaga Sukarela, Palang Merah Remaja tingkat Mula, Madya dan Wira. Tahun 2005-2017 jumlah anggota PMI Kabupaten/Kota 246 orang, KSR PMI Provinsi Aceh 821 orang dan Tenaga Sukarela (TSR) sebanyak 490 orang. (2) PMI Provinsi Aceh berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pemberian bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam, mengurangi penderitaan manusia, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti kegiatan donor darah, bakti sosial, pelayanan kendaraan atau ambulans gawat darurat, pelayanan pos pertolongan, pembinaan di sekolah-sekolah dengan memberikan penyuluhan pembinaan anak sekolah melalui pendidikan atau program Pendidikan Remaja Sebaya (PRS) dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Keywords: Kontribusi, PMI Provinsi Aceh.

PENDAHULUAN

Berdirinya Palang Merah di Indonesia dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama *Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie* (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia (Sumber: www.pmi.or.id, 2013:1).

Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai pada tahun 1940 walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan (Sumber: www.pmi.or.id, 2013:1).

Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota). Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang Sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963. Kini jaringan kerja PMI tersebar di 30 Daerah Propinsi / Tk.I dan 323 cabang di daerah Tk.II serta dukungan operasional 165 unit Transfusi Darah di seluruh Indonesia, salah satunya ialah Provinsi Aceh (Sumber: www.pmi.or.id, 2013:1).

Aceh adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Secara geografis Aceh memiliki letak daratan yang paling dekat dengan episentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Dampak yang ditimbulkan akibat bencana gempa tersebut yaitu hilangnya korban jiwa, rusaknya fasilitas fisik infrastruktur, dan terganggunya sistem sosial ekonomi di Aceh. Sebagai wilayah yang memiliki intensitas yang tinggi terhadap bencana, kesadaran akan respon terhadap penanggulangan bencana sangat berperan penting (Azhar, 2014:1-3).

Perkembangan PMI hingga saat ini sudah mencapai berbagai provinsi salah

satunya ialah Provinsi Aceh, yang berkedudukan di Jalan Stadion H. Dimoerthala Nomor 24 Banda Aceh. Pasca bencana tsunami tahun 2004, PMI Provinsi Aceh ini giat melakukan berbagai kegiatan bakti sosial dalam meningkatkan kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat setempat. Hal ini tidak terlepas dari tujuan awal berdirinya Palang Merah Indonesia (PMI) yang merupakan sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Tugas-tugas kepalangmerahan PMI cabang Aceh ini meliputi: Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, dan Pelayanan Transfusi Darah. Salah satu kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yang dilakukan PMI adalah mengumpulkan, menyimpan dan menyalurkan barang bantuan. Dalam menjalankan kegiatan tersebut PMI sering dihadapkan oleh kendala yang menghambat terpenuhinya kebutuhan bantuan yang diharapkan di daerah bencana. Kenyataan yang sering terjadi pasca bencana, PMI dinilai lamban dalam mengumpulkan bahan makanan, obat-obatan, pakaian, generator, mencari peralatan, mendaftarkan sukarelawan, melakukan koordinasi, dan lainnya

Kontribusi PMI Aceh ini adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui Undang-Undang Nomor 59. Dalam melaksanakan

tugasnya PMI berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik ingin mengadakan suatu penelitian dengan judul “*Kontribusi Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh, 2005-2017*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh tahun 2005-2017 dan kontribusi Palang Merang Indonesia Provinsi Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Banda Aceh tahun 2005-2017.

Anggapan dasar dalam penelitian ini ialah “lembaga Palang Meran Indonesia (PMI) ialah lembaga yang berperan dalam memberikan pendonoran darah bagi kesehatan masyarakat”. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah lembaga Palang Merah Indonesia di Aceh telah memberikan kontribusi besar dalam aspek kemanusiaan seperti donor darah, pemberian bantuan korban bencana dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Menurut Jane Richie dalam Moleong (2007: 6), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Suhartono

Pranoto (2006:11), mengemukakan metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek atau dengan kata lain metode merupakan cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur. Karena penelitian ini bertujuan merekonstruksi masa lalu, maka metode yang digunakan metode sejarah. Gilbert J. Garraghan dalam Abdurrahman (1999:43) mengemukakan bahwa metode sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sistesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk yang tertulis.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor PMI Kota Banda Aceh atau lebih tepatnya Jalan Stadion H. Dimoerthala Nomor 24, Banda Aceh. Waktu penelitian dimulai akhir bulan Februari 2017 dan sampai April 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data tentang kontribusi Palang Merah Indonesia Aceh Provinsi tahun 2005-2017, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber primer dari objek yang akan diteliti. Agar mendapatkan sumber atau data primer dari objek yang akan diteliti, maka penulis akan mencari dokumen-dokumen seperti data yang tersimpan pada laporan tahunan PMI Aceh, catatan-catatan pribadi pelaku, data BPS

Kabupaten Aceh dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan objek kajian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang perkembangan Palang Merah Indonesia Aceh pasca tsunami, 2005-2017. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui informasi-informasi tambahan tentang aspek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan wawancara mendalam yang bersifat terbuka dengan memberikan kesempatan kepada informan untuk menjawab secara bebas terhadap apa yang dipertanyakan, karena dengan wawancara mendalam peneliti dapat mengetahui alasan sebenarnya dari responden. Nara sumber yang penulis wawancarai secara langsung antara lain mantan ketua PMI Aceh yang pernah menjabat sejak tahun 2005-2017, ketua PMI Aceh sekarang, para staf dan pegawai PMI Aceh, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain yang memiliki pengetahuan terkait perkembangan Palang Merah Indonesia Aceh pasca tsunami, 2005-2017.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan terutama untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam kegiatan ini penulis akan mengumpulkan berbagai buku-buku bacaan, majalah, artikel dan hasil-hasil laporan penelitian berupa skripsi, tesis dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan awal

tentang perkembangan Palang Merah Indonesia Aceh, 2005-2017. Studi kepustakaan ini dilakukan di berbagai pustaka seperti, Perpustakaan Wilayah Banda Aceh, Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Perpustakaan Fakultas FKIP Unsyiah.

4. Observasi Lapangan

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit (Bugin, 2011: 143). Observasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengadakan suatu penelitian. Dalam kegiatan ini penulis akan mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Seperti infrastruktur kelembagaan dan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh PMI Aceh.

Teknik Analisis Data

Langkah terakhir yang penulis lakukan ialah menganalisis semua data atau seluruh data yang telah dikumpulkan analisis dilakukan dengan cara membandingkan berbagai data tersebut untuk ditarik suatu kesimpulan yang utuh dan menyeluruh. Selain itu sumber atau data yang dikumpulkan juga dianalisis dengan memisah-misahkan atau menyaring dan mengkritik keabsahan sumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang otentik. Setelah sumber yang asli diperoleh

kemudian dianalisa untuk memperoleh fakta, setelah fakta diperoleh kemudian langkah terakhir ialah dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah. Penulisan dilakukan dengan cara sistematis dan kronologis sesuai dengan kaidah ilmu sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepengurusan PMI Provinsi Aceh

Sebagai sebuah lembaga yang berperan penting dalam memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat, PMI Provinsi Aceh telah membentuk kepengurusan yang bertujuan menjalankan visi dan misinya. Susunan kepengurusan PMI Provinsi Aceh ini langsung berada di bawah pemerintahan Aceh yakni gubernur, kemudian diketuai oleh ketua dewan kehormatan lembaga yang dibantu oleh 4 orang anggota. Tidak hanya anggota tersebut, PMI Provinsi Aceh juga membentuk berbagai bidang dalam merealisasikan visi dan misinya kepada masyarakat. Masing-masing bidang tersebut kemudian dipimpin oleh kepala bidang masing-masing. Berikut ini susunan kepengurusan PMI Provinsi Aceh.

Tabel 1. Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh Periode 2015 – 2020

Jabatan	Nama
Uang	nur Provinsi Aceh
	Ir. Teuku Alaidinsyah, M. Eng
Ketua Bidang Organisasi	Murdani Yusuf, SE
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana	H. Anwar Daud, SH
Ketua Bidang Kesehatan & Donor Darah	dr. Kurnia Fitri Jamil, M. Kes, Sp.PD
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga	Ir. Suryadi
Ketua Bidang Sukarelawan	Ansari Muhammad, S.Pt
aris	Drs. Muhammad AH, M. Kom I
Sekretaris	Rudianto, SE
hara	Dedy Saputra Lukman, B.Com
Bendahara	T. Husnisyah, SP
ta	1. Edwar M. Nur, SE. MM 2. T. Ardiansyah, SH 3. Muzni Haffaz 4. H. Edi Ahyar, SE 5. Ir. Suwarli

Sumber: Arsip Kantor PMI Provin Aceh, 2017.

Perkembangan Jumlah Relawan PMI Provinsi Aceh, 2005 – 2017

Keberhasilan sebuah lembaga PMI tidak bisa dilepaskan dari keberadaan relawan atau keanggotaannya. PMI Provinsi Aceh sejak 2005-2017 sudah memiliki ribuan relawan dalam berbagai kategori baik pengurus dan staf PMI Kabupaten dan Kota, Korps Sukarela,

Tenaga Sukarela, Palang Merah Remaja tingkat Mula, Madya dan Wira. Untuk lebih lejasnya perkembangan jumlah relawan PMI Provinsi Aceh, 2005-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Relawan PMI Provinsi Aceh, 2005 – 2017

No	Tahun	Kategori Relawan PMI Provinsi Aceh						
		Pengurus PMI Kabupaten dan Kota	Staf PMI Kabupat en dan Kota	Korps Sukarela (KSR)	Tenaga Sukarela (TSR)	Palang Merah Remaja (PMR)		
						Mula	Madya	Wira
1	2005	400	-	1002	900	216	2001	4000
2	2006	428	-	1022	860	220	2021	3900
3	2007	434	-	1030	838	239	2053	3809
4	2008	398	-	990	820	209	2010	3780
5	2009	350	-	986	800	198	1994	3770
6	2010	300	-	958	749	183	1960	3700
7	2011	290	-	970	687	174	1588	3708
8	2012	253	-	974	613	165	1387	3699
9	2013	258	-	965	601	152	1300	3600
10	2014	240	-	940	560	140	1283	3530
11	2015	230	-	910	535	120	1109	3400
12	2016	250	-	830	511	109	1080	3006
13	2017	246	-	821	490	98	1005	2909

Sumber: Arsip Kantor PMI Provinsi Aceh, 2017.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas jelaslah bahwa jumlah keanggotaan atau relawan PMI Provinsi Aceh sejak pasca 2005-2017 terus mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pasca bencana tsunami tidak terdapat lagi bencana yang memamakan korban banyak, hanya berupa bencana

yang membutuhkan bantuan kecil seperti bencana banjir. Jika diperhatikan tabel di

atas terdapat perkembangan jumlah anggota pengurus PMI kabupaten dan kota Provinsi Aceh, di tahun 2005 jumlah anggota PMI Kabupaten Kota mencapai 400 orang dan mencapai puncaknya tahun 2007 dengan jumlah 434 orang. Tingginya jumlah keanggotaan PMI kabupaten dan kota ini dikarenakan masih dibutuhkan tenaga pembantu dalam menanggapi

bencana terutama pasca tsunami 2004. Jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya dari 398 orang tahun 2009 menjadi 246 orang pada tahun 2017.

Penurunan jumlah keanggotaan PMI ini juga terlihat pada kepengurusan lainnya seperti bagian Korps Sukarela (KSR). Jumlah relawan bagian KSR PMI Provinsi Aceh, di tahun 2005 jumlah anggota relawan KSR PMI Provinsi Aceh mencapai 1002 orang dan mencapai puncaknya tahun 2007 dengan jumlah 1030 orang. Tingginya jumlah keanggotaan KSR PMI Provinsi Aceh ini dikarenakan masih dibutuhkannya tenaga pembantu dalam menangani bencana terutama pasca tsunami 2004. Jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya dari 990 orang tahun 2009 menjadi 821 orang pada tahun 2017.

Begitu juga dengan keanggotaan bagian Tenaga Sukarela (TSR) yang mengalami penurunan jumlah keanggotannya. Jumlah relawan bagian TSR PMI Provinsi Aceh, di tahun 2005 jumlah anggota relawan TSR PMI Provinsi Aceh mencapai 900 orang. Jumlah tersebut terus mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya bahkan hanya tinggal 490 di tahun 2017. Penurunan anggota PMI Provinsi Aceh juga melibatkan keanggotaan Palang Merah Remaja (PMR) yang terdiri dari Mula, Madya dan Wira.

Upaya Pengembangan Organisasi PMI Provinsi Aceh, 2005-2017

Pengembangan organisasi PMI Provinsi Aceh sejak tahun 2005-2017

dilakukan melalui tahapan baik yang bersifat ketenaga pegawaian maupun program yang dijalankan. Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini karyawan PMI Aceh dimulai dari tingkat kepengurusan. Kepengurusan PMI Aceh memiliki masa kepengurusan aktif selama lima tahun, disetiap tahunnya para karyawan melaksanakan musyawarah kerja, mendapatkan orientasi kepalang merahan.

Pengembangan organisasi PMI Aceh juga diupayakan dengan meningkatkan kualitas para stafnya terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada, menjalankan program kerja yang di buat oleh pengurus, mendapatkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang menunjang pelaksanaan manajerial, merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku. Ini semua dilakukan dengan memberikan pembekalan dan pelatihan baik melalui seminar maupun pembinaan lainnya.

Tidak hanya sebatas pengurus dan karyawan dalam upaya pengembangannya, PMI Aceh juga meningkatkan kualitas para relawan dalam melaksanakan tugas pelayanan PMI kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Hal ini dilakukan agar relawan PMI Aceh dapat melaksanakan pelayanan dengan baik serta memiliki ketrampilan. Upaya pengembangan kompetensi relawan PMI Aceh ini juga dilakukan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kompoetensi yang melekat pada masing-masing relawan.

Pengembangan yang dilakukan oleh PMI Aceh tentu didukung oleh pendanaan, kapasitas SDM yang cukup dan terampil belumlah maksimal dalam melakukan pelayanan tanpa di tunjang dengan sumber daya keuangan yang baik, PMI perlu membuka alternative pendanaan yang tidak semata bersumber dari pemerintah melainkan membuka pola pendanaan yang bersumber dari masyarakat dan pihak swasta.

Adanya dukungan dari aspek SDM dan pendanaan, maka tahun 2012 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan-Peraturan Organisasi PMI (PO), maka PMI Pusat telah menerbitkan 12 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan 26 Petunjuk Teknis (Juknis) Organisasi PMI, yang ditetapkan saat MUKERNAS PMI tahun 2012. Pelaksanaan petunjuk PMI Pusat tersebut oleh PMI Aceh dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi organisasi PMI. Kedua aspek ini dilakukan terhadap pemantauan persiapan dan pelaksanaan musyawarah di segenap PMI Kabupaten menghimbau PMI Kabupaten/Kota untuk segera melaksanakan musyawarah untuk pemilihan pengurus apabila telah lewat masa kedaluwarsa sebagai salah satu prasyarat untuk ikut dalam MUNAS XX tahun 2014.

Selain itu untuk meningkatkan kapasitas organisasi menuju Perhimpunan Nasional yang berfungsi baik. Dengan memantau pelaksanaan PO/Juklak/Juknis serta Kinerja Markas PMI di semua tingkatan, PMI Pusat telah menerbitkan Kuestioner Penilaian Kapasitas dan Kinerja Organisasi yang disepakati 33 Pengurus PMI Provinsi pada Rapat Kerja

Bidang Organisasi dan Kelembagaan pada tanggal 30 November s/d 4 Desember 2012 di Semarang (Jawa Tengah). Tercatat 286 PMI Kab/Kota (dari 459,62,58%) dari 31 PMI Provinsi telah mengirim kembali kuestioner penilaian ke Markas Pusat PMI.

Sesuai dengan temuan dari hasil kuesioner yang terangkum di dalam dokumen fact sheet tahun 2012 merefleksikan capaian pada tahun 2013 bahwa 20 (dua puluh) PMI Provinsi Aceh termasuk kategori Baik (> 80 poin) dan 12 (dua belas) PMI Provinsi dalam kategori Sedang (60 – 80 poin). Namun demikian nilai capaian tersebut tidak berkorelasi langsung terhadap kinerja organisasi dari tiap PMI Kabupaten/Kota di masing-masing PMI Provinsi.

Kontribusi PMI Provinsi Aceh Tahun 2005-2017.

Sejak berdirinya PMI Provinsi Aceh, khususnya pasca tsunami 2004 telah memberikan peranan besar dalam menangani masalah sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa staf PMI Provinsi Aceh mengatakan bahwa pada dasarnya peranan PMI Provinsi Aceh adalah membantu masyarakat di bidang sosial kemanusiaan. Seperti membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia dan bertujuan untuk membantu mengurangi penderitaan manusia. Sifatnya netral, sukarela dan adil sehingga dalam hal memberikan pertolongan PMI Provinsi Aceh tidak membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan

sebagainya serta tidak meminta imbalan apapun. Sejak tahun 2005-2017 PMI Provinsi Aceh telah memberikan kontribusi besar dalam bidang kemanusiaan terutama bagi masyarakat yang terkena bencana alam, di antaranya sebagai berikut.

1. Bantuan Air Bersih dan Rehabilitas Gempa Bumi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah 2013

Salah satu kontribusi PMI Aceh tahun 2013 ialah pemberian bantuan kebencanaan kepada masyarakat korban gempa bumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah tahun 2013. Kontribusi ini berupa penyerahan bantuan 20.000 lembar seng dan air bersih ke lokasi gempa Bumi di Aceh Tengah. Bantuan seng dan air bersih diberikan untuk membantu proses rehabilitasi warga korban bencana.

2. Bantuan Gempa Pidie Jaya Tahun 2016

Kontribusi PMI Provinsi Aceh juga terlihat pada bencana gempa di Pidie Jaya tahun 2016. Kontribusi Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh terlihat dengan membangun sejumlah saluran air bersih dan puskesmas pembantu di wilayah terkena dampak gempa. Pembangunan dua program tersebut dilakukan untuk membantu masa transisi korban gempa di Pidie Jaya. PMI Aceh juga mengadakan penggalangan dana untuk 500 paket "family kit", 500 paket "hygiene kit", 1.000 selimut, 1.000 terpaulin, 200 kantong mayat. PMI juga memobilisasi lima mobil tangki air dan tiga ambulans, 20 sukarelawan, lima tim pendampingan dan evakuasi untuk

membantu korban gempa di Kabupaten Pidie Jaya. Palang Merah Indonesia (PMI) juga memberikan stok darah untuk korban gempa di Pidie Jaya serta bantuan Sembako.

3. Bantuan Korban Bencana Kebakaran Gampong Laksana Kota Banda Aceh

Kontribusi PMI Aceh bukan hanya untuk korban gempa bumi melainkan juga untuk korban kebakaran. Hal ini ditandai dimana Palang Merah Indonesia (PMI) Banda Aceh menyalurkan bantuan sembako untuk korban kebakaran di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Bantuan yang disalurkan berupa sembako yang bersumber dari masyarakat melalui rekening PMI Peduli Sesama Bank Syariah Mandiri.

4. Bantuan Medis Pada Korban Rohingya

Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh tidak hanya memberikan kontribusi berupa bantuan kemanusiaan kepada korban masyarakat dalam negeri melainkan juga luar negeri. Hal ini ditandai dengan menyalurkan berbagai jenis obat-obatan kepada etnis Muslim Rohingya yang terdampar di Pantai Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen. Obat-obatan tersebut diserahkan langsung oleh pihak PMI kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen. Jenis obat-obatan yang disalurkan ke pengungsi Rohingya antara lain, obat untuk sakit lambung, paracetamol, obat gatal-gatal, obat diare,

obat untuk pertolongan pertama, antibiotik dan sejumlah obat-obatan untuk anak-anak.

5. Pelayanan Kesehatan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018

Palang Merah Indonesia (PMI) merespons bencana banjir yang melanda wilayah Aceh Utara. Tim medis PMI Aceh Utara pada Jumat (26/12) telah berhasil menembus wilayah yang terisolir seperti di KM 3 sampai KM 7 jalan menuju Cot Girek untuk mendistribusikan obat dan memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak banjir telah dilaksanakan di (1) Lhoksukon terlayani 800 jiwa, (2) Langkahan terlayani 500 jiwa, (3). Muara Batu sebanyak 200 jiwa, dan (4) Cot Girek terlayani 250 jiwa. Pelayanan kesehatan ditangani oleh tim Medis RS PMI Aceh Utara yang terdiri dari 4 dokter dan 12 paramedis. Selain pelayanan kesehatan secara keseluruhan 107 Sukarelawan PMI berjibaku melakukan asesment, evakuasi, ambulans dan distribusi bantuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Keberadaan PMI sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan terus berkembang hingga saat ini. PMI Provinsi Aceh mulai terlihat eksistensinya terutama pasca tsunami 2004. Setahun pasca tsunami PMI Provinsi Aceh terus mengalami perkembangan hingga tahun 2017. Sejak

2005-2017 sudah memiliki ribuan relawan dalam berbagai kategori baik pengurus dan staf PMI Kabupaten dan Kota, Korps Sukarela, Tenaga Sukarela, Palang Merah Remaja tingkat Mula, Madya dan Wira. Tahun 2005-2017 jumlah anggota PMI Kabupaten/Kota 246 orang, KSR PMI Provinsi Aceh 821 orang dan Tenaga Sukarela (TSR) sebanyak 490 orang.

Kontribusi PMI Provinsi Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlihat dalam beberapa aspek seperti menangani masalah sosial kemanusiaan berupa pemberian bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, mengurangi penderitaan manusia, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti kegiatan donor darah, bakti sosial, pelayanan kendaraan atau ambulan gawat darurat, pelayanan pos pertolongan, pembinaan di sekolah-sekolah terutama sekolah dengan memberikan penyuluhan untuk memberikan pemahaman masyarakat, pembinaan anak sekolah melalui pendidikan atau program Pendidikan Remaja Sebaya (PRS) dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Agustina, 2014. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Bantuan Dalam Penanggulangan Bencana Di Aceh (Studi Kasus Pada Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Manca Buana.

Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*. 1999. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Basrowi & Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kuntowijoyo, 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Benteng Budaya.

Maleong, Laxy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Pranoto, Suhartono, 2006. *Teori Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sapta, Seven Audi, 2009. *Kenali PMI*. Jakarta: ISBN dan IFRC (*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*/Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah).

Internet: www.pmi.or.id, diakses: 26 Februari 2016.